



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dapat tersusun.

Perubahan Rencana Strategis merupakan Instrumen dalam rangka mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perubahan Renstra ini merupakan awal dari proses Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam 5 (lima) tahun ke depan ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan dalam pelaksanaan pembangunan secara bertahap dari tahun ke tahun, sehingga apa yang menjadi Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal akan terwujud.

Penyusunan Perubahan Renstra ini tentunya jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masyarakat dan pihak yang berkompeten untuk memberikan masukan dan umpan balik, guna perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

Slawi, 2021
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja
Kabupaten Tegal

MOH. NUR MA'MUN, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19620816 198703 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	BAB I - 1
1.2 Landasan Hukum	BAB I - 5
1.3 Maksud dan Tujuan	BAB I - 9
1.4 Sistematika Penulisan	BAB I - 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. TEGAL	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	BAB II - 1
2.2 Sumber Daya Disperinaker Kab. Tegal	BAB II - 10
2.2.1 Sumber Daya Manusia	BAB II - 10
2.2.2 Asset / Modal	BAB II - 14
2.3 Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal.....	BAB II – 19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal	BAB II - 40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	BAB III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	BAB III - 4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi	BAB III - 11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	BAB III – 31
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	BAB III – 32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	BAB IV - 1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	BAB IV – 1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 StrategiBAB V – 1
- 5.2 Pengarusutamaan dalam Pembangunan BAB V - 1
- 5.3 Arah Kebijakan BAB V - 2

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

INDIKATIF

- 6.1 Program BAB VI – 1
- 6.2 Kegiatan BAB VI – 2

BAB VII KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN TEGAL

- 7.1 Indikator dan Target Kinerja Sasaran RPJMDBAB VII – 1

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal berdasarkan Jenis Kelamin, Pangkat & Golongan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.....	BAB II - 10
Tabel 2.2 Data Asset Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	BAB II – 14
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020	BAB II – 20
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2019.....	BAB II – 22
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020	BAB II – 33
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019	BAB II – 37
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)	BAB II – 43
Tabel 3.1 Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	BAB III – 2
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni)	BAB IV – 2
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)	BAB IV – 3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2019-2024	BAB V – 3
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020 - 2024	BAB VI – 2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni).....	BAB VII – 2
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan).....	BAB VII – 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen PerencanaanBAB I - 5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Cascading Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. *Pertama*, tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto; *Kedua* tenaga kerja sebagai anggota kelompok masyarakat yang menjadi target untuk ditingkatkan kapasitas, ketrampilan, pendapatan dan kesejahteraannya.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Tegal memberikan pengaruh yang sangat signifikan yaitu sebesar 35% dari sektor lainnya. Sektor industri memberikan multi efek terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Keberlangsungan sektor industri harus didukung oleh aspek lainnya yang berpengaruh besar yaitu aspek demografi, regulasi, dan sumber daya alam. Iklim usaha yang sehat dan kompetitif diperlukan dan harus diupayakan oleh seluruh komponen daerah.

Dinamika pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dengan perubahan kondisi regulasi maupun kondisi eksternal berupa perekonomian, demografi dan kejadian tak terduga mengakibatkan adanya penyesuaian dan adaptasi agar pelaksanaan pembangunan bisa sejalan dengan tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan

dampak pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang baru. Peraturan Presiden Nomor 79 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregas Malang). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adanya pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek ekonomi, social dan kesejahteraan masyarakat serta pendanaan dalam APBD dan struktur RPJMD.

Menyikapi perubahan kondisi tersebut diatas maka Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2019 melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 perlu diubah dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan review dan revisi terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Teanga Kerja Kabupaten Tegal sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Dalam bidang pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal masalah utama yang harus kita hadapi dalam 5 tahun kedepan adalah tingginya angka pengangguran yang ditunjukkan oleh angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Dalam penanganan pengangguran ini harus merupakan upaya terpadu dari berbagai pihak yang mengarah pada upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok seperti buruh tani dan petani penggarap, nelayan,

buruh industri kecil dan sektor Industri Kecil Menengah. Upaya pengurangan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru, dan yang kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.

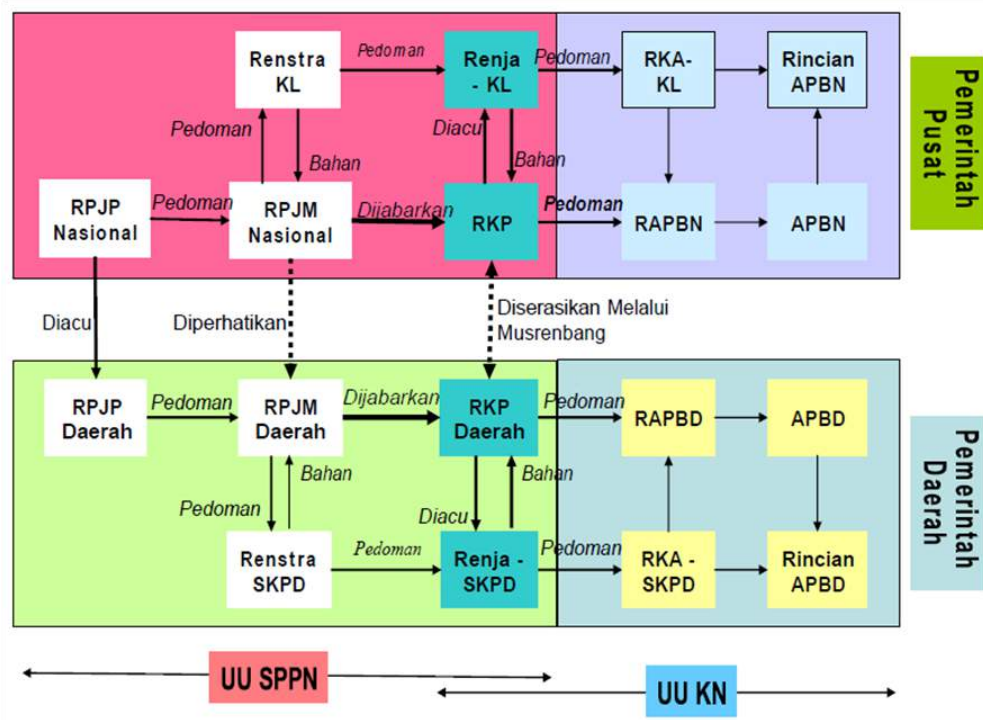
Isu-isu terkait ketenagakerjaan dan industri merupakan tugas yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal maka urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait pembangunan dan pengembangan bidang tenaga kerja dan industri secara khusus di Kabupaten Tegal, oleh karenanya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal disusun sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dan mengacu pada Visi, Misi Bupati Tegal Periode 2019–2024.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal, maka secara otomatis Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta RPJM

Nasional. Selain itu, Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal juga memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2020-2024.

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJM Daerah Kabupaten adalah Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJM Daerah Kabupaten untuk setiap Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal. Secara diagramatis keterkaitan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal melaksanakan urusan pemerintah dibidang perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi, sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian sesuai urusannya seperti Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu juga harus berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019-2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4279);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota:
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregas Malang).
 21. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memudahkan aparatur Pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami strategi dan arah kebijakan

Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama lima tahun ke depan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- b. Merupakan dokumen perencanaan strategis dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Sebagai pedoman/acuan dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun.
- b. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun urusan perindustrian, tenaga dan transmigrasi.,
- c. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tegal .

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD sesuai bidang urusan dalam lima tahun mendatang yang juga tercantum pada RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB.TEGAL

Tugas Pokok Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah pada Urusan Perindustrian, Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Transmigrasi Kabupaten Tegal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Adapun tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dapat dijabarkan sebagai berikut:

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- b. Penerbitan IUI Kecil dan IUI Menengah;
- c. Penerbitan IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah;
- d. Penerbitan IUKI dan IPKI yang Lokasinya di Daerah Kabupaten
- e. Penyampaian Laporan Informasi Industri Untuk: 1. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; 2. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan 3. IUKI Dan IPKI yang Lokasinya di Daerah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
- g. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- h. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- i. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;

- j. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten;
- k. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten;
- l. Penerbitan Izin LPTKS Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- m. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dalam Daerah Kabupaten;
- n. Perlindungan TKI Di Luar Negeri (Pra Dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten;
- o. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- p. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten;
- q. Penerbitan Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- r. Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi Di Daerah Kabupaten;
- s. Penataan Pesebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten;
- t. Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian;

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

- Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

- Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan

- umum dan teknis operasional Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
 - e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
 - g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian Perumusan Rencana Kerja Urusan Perindustrian;
- b. Pengoordinasian Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program urusan Industri;
- c. Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Industri.

4. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI

- Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian Izin Usaha Industri dan pengelolaan Sistem Informasi Industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang Pengendalian Izin Usaha Industri dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri.

5. KEPALA BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN KETRANSMIGRASIAN

- Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan ketransmigrasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan Ketransmigrasian;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan Ketransmigrasian;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan Ketransmigrasian;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan Ketransmigrasian;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan Ketransmigrasian;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan Ketransmigrasian;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan Ketransmigrasian.

6. KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

- Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

7. KEPALA UPTD LABORATORIUM PERINDUSTRIAN KELAS A

- Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala UPTD Laboratorium Perindustrian Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan laboratorium perindustrian. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Kepala UPTD Laboratorium Perindustrian

Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium perindustrian;
- c. Pelaksanaan pelayanan laboratorium uji material;
- d. Pelaksanaan pembinaan peningkatan standart sistem mutu produk;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTDLaboratorium Perindustrian

8. KEPALA UPTD LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL (LIK) KELAS A

- Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala UPTD Lingkungan Industri Kecil Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan lingkungan industri kecil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD Lingkungan Industri Kecil Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan industri kecil;
- c. Penyediaan data dan pusat informasi pasar;
- d. Pelaksanaan pusat kegiatan pendampingan, pendidikan dan latihan, pemagangan dan studibanding;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTDLingkungan Industri Kecil Kelas A.

9. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA (UPTD BLK) KELAS A

- Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala UPTD BLK Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan Balai Latihan Kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala UPTD BLK Kelas A mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan BLK;
- c. Pelaksanaan pemasaran program fasilitas pelatihan, produksi dan jasa hasil pelatihan serta pelayanan informasi pelatihan;
- d. Pelaksanaan pelatihan, mencari peluang kesempatan kerja, dan koordinasi penempatan tenaga kerja hasil pelatihan;
- e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD BLK Kelas A.

10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

a. Instruktur

b. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

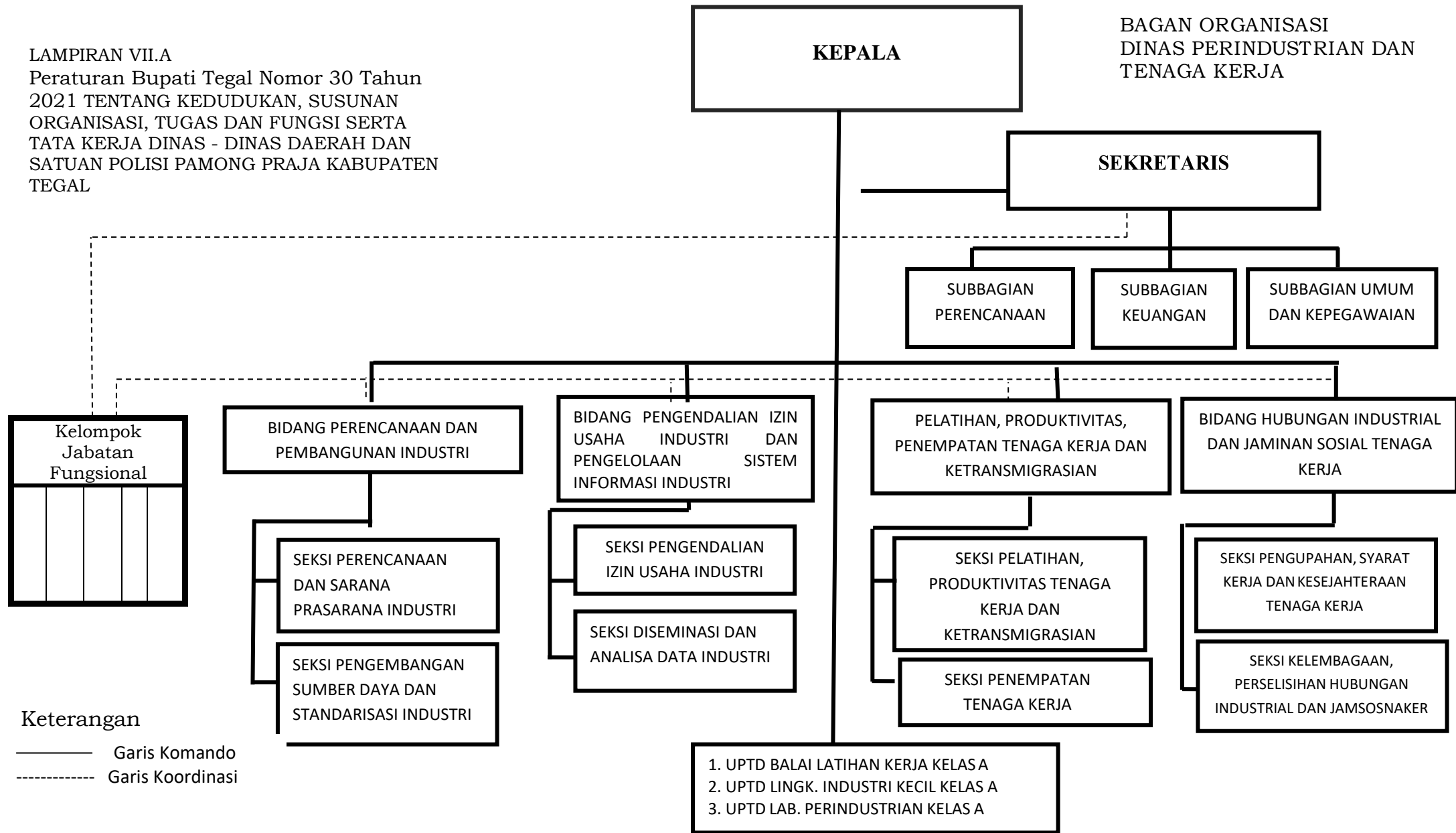
c. Mediator Hubungan Industrial

d. Pengantar Kerja

e. Pranata Humas

LAMPIRAN VII.A
 Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun
 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH DAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
 TEGAL

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 TENAGA KERJA



Keterangan

- Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat sejumlah 73 pegawai negeri yang terdiri seperti pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Tegal berdasarkan Jenis Kelamin, Pangkat & Golongan, serta Kelompok Jabatan Fungsional

1. Rekapitulasi CPNS Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah					Jumlah Total
		a	b	c	d	e	
1.	IV	-	-	-	-	-	-
2.	III	11	-	-	-	-	11
3.	II	-	-	-	-	-	-
4.	I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL							11

2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan	Jumlah					Jumlah Total
		a	b	c	d	e	
1.	IV	10	2	1			13
2.	III	4	7	4	19		34
3.	II	-	4	6	5		15
4.	I						
JUMLAH TOTAL							62

3. Rekapitulasi CPNS dan PNS Berdasarkan Agama

No.	STATUS	Jumlah	AGAMA				
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1.	CPNS	11	11	-	-	-	-
2.	PNS	62	60	1	1	-	-
JUMLAH TOTAL		73	71	1	1	-	-

4. Rekapitulasi CPNS dan PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Jumlah	
			Laki-laki	Perempuan
1.	CPNS	11	6	5
2.	PNS	62	51	11
JUMLAH TOTAL		73	57	16

5. Rekapitulasi CPNS dan PNS Berdasarkan Agama dan Status Perkawinan

No.	STATUS	Jumlah	STATUS PERKAWINAN			
			Kawin	Blm Kawin	Janda	Duda
1.	CPNS	11	4	7	-	-
2.	PNS	62	59	-	2	-
JUMLAH TOTAL		73	63	7	2	1

6. Rekapitulasi CPNS dan PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Umum (pendidikan terakhir)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Total
		CPNS	PNS	
1.	S3	-	-	-
2.	S2	-	9	9
3.	S1	11	29	40
4.	DIV	-	-	-
5.	DIII	-	6	6
6.	DII	-	-	-
7.	DI	-	-	-
8.	SLTA/Sederajat	-	15	15
9.	SLTP/Sederajat	-	3	3
10.	SD/Sederajat	-	-	-
JUMLAH TOTAL		11	62	73

7. Rekapitulasi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon

No.	ESELON	Jumlah Pejabat Struktural		
		Formasi	Terisi	Kosong
1.	Ila	-	-	-
2.	Iib	1	1	-
3.	IIIa	1	1	-
4.	IIIb	4	4	-
5.	IVa	14	14	-
6.	IVb	1	1	-
7.	V	-	-	-
JUMLAH TOTAL		21	21	0

8. Rekapitulasi Pejabat Struktural Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	JML.
1.	S3	-
2.	S2	6
3.	S1	14
4.	DIV	-
5.	DIII	1
JUMLAH TOTAL		21

9. Jumlah Jabatan Fungsional

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Instruktur BLK	17
2.	Pengantar Kerja	1
3.	Mediator Hubungan Industrial	1
4.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	7
5.	Pranata Hubungan Masyarakat	1
6.	Statistisi	0
JUMLAH TOTAL		27

10. Rekapitulasi Jabatan Fungsional Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Jenis Jafung	Jumlah															Jumlah Total		
		I				II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d	e
1.	Instruktur BLK	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	4	4	1	-	-	-	17
2.	Pengantar Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Mediator Hubungan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	7
5.	Pranata Hubungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	Statistisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kekurangan jumlah pegawai sebanyak 30 orang dari total kebutuhan yaitu 134 orang. Disamping kekurangan pegawai dari segi kuantitas tersebut, juga masih terdapat kekurangan secara kualitas sebanyak $\pm 40\%$ (empat puluh per seratus) yang perlu terus ditingkatkan kemampuannya baik kompetensi maupun kinerjanya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Ketercukupan jumlah pegawai tidak akan memperoleh hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas. Dari awal berdirinya perangkat daerah pada Tahun 2017 sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas, namun demikian penyelesaian tugas menjadikan prioritas yang harus dilaksanakan walaupun dengan sarana dan prasarana yang serba minimal. Dengan berjalannya waktu tahun demi tahun terdapat peningkatan anggaran yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana prasarana yang sangat urgen untuk segera

dipenuhi diantaranya personal komputer (PC), laptop/notebook, printer, LCD, kendaraan dinas operasional, meja dan kursi kerja, meja rapat, filling cabinet dan lemari besi. Namun keseluruhan pengadaan dan penyediaan sarana prasarana kerja tersebut masih belum mencukupi dan masih ada sarana prasarana yang perlu diperbarui mengingat usia dan perkembangan teknologi.

2.2.2. Asset/Modal

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Data Asset Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
A. KIB A (Tanah)				
1.1.1	Tanah Persil			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	BAIK	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	BAIK	Kantor UPTD LIK
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	BAIK	RUKO di LIK
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	BAIK	Kantor UPTD BLK
B. KIB B (Peralatan dan Mesin)				
2.1.1	Alat Besar Darat			
	Forklift	1	BAIK	
2.1.3	Alat Bantu			
	Portable Generating Set	1	BAIK	
2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor			
	Station Wagon (Toyota Kijang MB Long Standar (LX) KF80R / LX)	1	BAIK	G 9505 BP
	Station Wagon (Toyota Avanza)	1	BAIK	G 9501 ZF
	Station Wagon (Toyota kijang Inova)	1	BAIK	G 9507 MP
	Station Wagon (Toyota Avanza)	1	BAIK	G 233 F
	Mobil Suzuki Carry Futura	1	BAIK	G 157 F
	Mobil Suzuki Carry Futura	1	BAIK	G 9503 CF
	Station Wagon XPANDER / M/T-VIN	1	BAIK	G 1048 XF
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R	1	BAIK	G 9763 P

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
	4D7			
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9769 P
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9764 P
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9815 BF
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9953 P
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9958 P
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9956 P
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9957 P
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9813 BP
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9814 BP
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7	1	BAIK	G 9762 P
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7 Yamaha / Mio J 54P AT	1	BAIK	G 9868 CF
	Sepeda Motor Yamaha / Vega R 4D7 Yamaha / Mio J 54P AT	1	BAIK	G 9869 CF
	Sepeda Motor Yamaha / Vega RR 5D9	1	BAIK	G 9867 CF
	Sepeda Motor Yamaha / Vega RR 5D9	1	BAIK	G 9866 CF
	Sepeda Motor (Honda CBR)	1	BAIK	G 9844 AF
	Sepeda Motor (Honda CBR)	1	BAIK	G 9845 AF
	Sepeda Motor (Honda Supra X)	1	BAIK	G 9847 AF
	Sepeda Motor YAMAHA ALL NEW NMAX / NON ABS VIN	1	BAIK	G 6162 XF
	Sepeda Motor YAMAHA ALL NEW NMAX / NON ABS VIN	1	BAIK	G 6160 XF
2.3.1	Alat Bengkel Bermesin			
	Mesin Bubut	1	BAIK	
	Mesin Skrup	1	BAIK	
	Mesin Milling	1	BAIK	
	Dray Chemical Fire Extingusiner	1	BAIK	
	Heat Treatment Furnace	1	BAIK	
	Material Handling	1	BAIK	
	Measuring and Machine Tool	1	BAIK	
	Mesin Frais (Press)	1	BAIK	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
	Mesin Bor	1	BAIK	
	Mesin Pemotong Plat	1	BAIK	
	Mesin Las Listrik	1	BAIK	
	Mesin Ketam	1	BAIK	
2.3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin			
	Mesin CNC	3	BAIK	
2.3.3	Alat Ukur			
	Timbangan Meja	3	BAIK	
	Neraca Ukur	2	BAIK	
2.4.1	Alat Pengolahan			
	Mesin Pipih/Giling Adonan	1	BAIK	
	Mesin Rajang/Iris Tempe dll	1	BAIK	
	Trolley	1	BAIK	
	PDA WIN KIT (E.C) WIN 7 dan Cable SCSI RCL FS31-20	1	BAIK	
	Mesin Kemasan Flatbed Cutter 1 Unit	1	BAIK	
2.5.1	Alat Kantor			
	Lemari Kayu	10	BAIK	
	Rak Kayu	15	BAIK	
	Filling Cabinet Besi	10	BAIK	
	Lemari Display	5	BAIK	
	Alat Pemotong Kertas	1	BAIK	
	Lemari Besi (Locker)	10	BAIK	
	Layar LCD Projector	1	BAIK	
2.5.2	Alat Rumah Tangga			
	Mesin Pemotong Rumput	4	BAIK	
	AC Split	19	BAIK	
	Lemari Es	2	BAIK	
	Televisi	1	BAIK	
	Unit Power Supply	7	BAIK	
	Stabilisator	4	BAIK	
	Gordyn (Vertikal Blind)	2	BAIK	
2.5.3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2	BAIK	
	Meja Tamu Biasa	1	BAIK	
	Meja Kerja Pegawai	80	BAIK	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	BAIK	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	BAIK	
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	80	BAIK	

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	BAIK	
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	BAIK	
2.6.1	Alat Studio			
	Microphone/Wireless MIC	1	BAIK	
	CCTV	2	BAIK	
	Mesin Seaming	1	BAIK	
	Mesin Cetak Stiker Blackjet ECO Solvent INK 4 Warna	1	BAIK	
	Layar D-Light Tripod 84"	1	BAIK	
2.6.2	Alat Komunikasi			
	Pembelian Notepad/Tab/Smartphone	2	BAIK	
	Pesawat Telephone	1	BAIK	
	Facsimile	1	BAIK	
	Telephone (PABX)	1	BAIK	
2.7.1	Alat Kedokteran			
	Meja Makan Pasien (Emergency Kit)	1	BAIK	
	Tiang Infus ss (Emergency Kit)	1	BAIK	
2.8.1	Unit Alat Laboratorium			
	Dialcaliter	5	BAIK	
	Mesin Bor Pembuat Ulir	2	BAIK	
	Salt Spray Test Chamber	1	BAIK	
	Surface Grinding Machine	1	BAIK	
	Mesin Cutting Stiker	1		
	Processor	5		
	Hydrolic Hand Press	14		
	Generator Hand Sprayer	2		
	Cutting Machine	2		
	Packaging Machine	1		
	Vacum Pump	2		
2.8.2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir			
	Tachometer (General Laboratory Tool)	3		
2.8.3	Alat Peraga Praktek Sekolah			
	Pembelian Universal Bavel Protektor 150 mm	1		
	Mikroskop	1		
2.8.4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika			
	Scanner (Assembly/counting System)	1		
2.8.8	Peralatan Laboratorium			

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
	Hydrodinamica			
	Solid Works 2015	1		
	Dell Precision T1700	1		
2.10.1	Komputer Unit			
	Lap Top ASUS	10	BAIK	
	Note Book	2	BAIK	
	P.C Unit	10	BAIK	
2.10.2	Peralatan Komputer			
	Printer CANON	13	BAIK	
	Printer EPSON	4	BAIK	
	Scanner	1	BAIK	
C. KIB C (Gedung dan Bangunan)				
41	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	BAIK	Gedung Kantor Pusat Disperinnaker
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	BAIK	Gedung Kantor UPTD LIK
43	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	BAIK	Gedung Kantor UPTD LAB
44	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	BAIK	Gedung Kantor UPTD BLK
45	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	BAIK	
46	Pagar Permanen	1	BAIK	
D. KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)				
47	Jalan Khusus Kompleks	1	BAIK	
48	Sumur Artetis	1	BAIK	
49	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	BAIK	
E. KIB E (Aset Tetap Lainnya)				
50	Barang Kerajinan Lain-lain	1	BAIK	Batik Motif Tegalan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Di samping itu, sesuai

standarisasi sarana dan prasarana kerja, personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta sebagian personal komputer sudah memerlukan pembaharuan mengingat kapasitas beberapa personal komputer telah berusia lama dan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

Pemenuhan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Perindustrian pada alat uji menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi karena hal ini merupakan layanan kepada masyarakat yang terdiri rekanan, perguruan tinggi dan pihak yang membutuhkan. Dalam rangka mewujudkan daya saing industri yang kompetitif baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pemenuhan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja pada ketersediaan media dan bahan pembelajaran serta sarana pendukung pelatihan lainnya berupa asrama menjadi perhatian dan perlu segera dicukupi karena hal ini merupakan layanan kepada masyarakat pencari kerja yang membutuhkan ketrampilan dan sertifikasi kompetensi.

Keterbatasan sarana dan prasarana perlengkapan kerja menjadikan perhatian dan perencanaan ke depan menjadi prioritas pemenuhan selain perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana bersangkutan guna mendukung capaian kinerja perangkat daerah yang optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Target Pendapatan

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Retribusi Sewa Tanah LIK	18.000.000	19.200.000	107	18.000.000	24.100.000	134	27.686.000	27.686.000	100	110.232.000	110.232.000	100
2	Retribusi Sewa Alat Lab. Uji Material	182.868.500	210.035.450	115	232.868.000	261.152.200	112	334.519.250	334.519.250	100	391.250.175	391.250.175	100
3	Sewa BLK	-	-	-	-	-	-	23.722.067	23.722.067	100	-	-	-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, pendapatan asli daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan, untuk retribusi sewa tanah LIK mengalami 134%sedangkan untuk retribusi sewa alat laboratorium uji material mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu mencapai 112%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk meningkatkan mutu produknya.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2017 sampai dengan 2019

Adapun realisasi program kegiatan urusan perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2019**

NO.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN			RASIO ANTARA ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%)			RATA - RATA PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	460.475.000	490.000.000	513.000.000	385.260.412	398.675.597	422.375.799	83,67%	81,36%	82,33%	82,45%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	209.975.000	225.000.000	240.000.000	153.527.182	171.623.827	210.273.991	73,12%	76,28%	87,61%	79,00%
2	Penyediaan ATK	30.000.000	40.000.000	45.000.000	25.427.780	32.091.570	44.885.300	84,76%	80,23%	99,75%	88,24%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	18.000.000	20.000.000	16.999.900	17.066.100	18.094.800	100,00%	94,81%	90,47%	95,10%
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	-	100,00%	100,00%	0,00%	66,67%
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000	9.000.000	10.000.000	12.493.800	7.351.200	7.351.200	99,95%	81,68%	73,51%	85,05%
6	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan perundang-undangan	8.000.000	13.000.000	13.000.000	6.896.500	12.330.000	10.320.000	86,21%	94,85%	79,38%	86,81%

7	Penyediaan makan dan minuman	60.000.000	60.000.000	60.000.000	59.820.000	57.711.000	54.460.000	99,70%	96,19%	90,77%	95,55%
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	120.000.000	120.000.000	120.000.000	107.095.250	95.501.900	76.990.508	89,25%	79,58%	64,16%	77,66%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	867.600.000	1.197.200.000	7.758.410.000	-	1.085.886.504	6.269.622.839	0,00%	90,70%	80,81%	57,17%
9	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	27.600.000	60.000.000	75.000.000	24.295.000	56.934.000	71.411.000	88,03%	94,89%	95,21%	92,71%
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	-	-	29.520.000	-	-	98,40%	-	-	32,80%
11	Pengadaan Mebeleur	30.000.000	-	20.000.000	29.535.000	-	19.889.000	98,45%	-	99,45%	65,97%
12	Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan	-	-	280.000.000	-	-	234.365.000	-	-	83,70%	27,90%
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	90.000.000	92.000.000	275.000.000	89.050.000	87.398.500	270.430.000	98,94%	95,00%	98,34%	97,43%
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	192.500.000	195.000.000	200.000.000	191.398.575	156.767.804	164.885.524	99,43%	80,39%	82,44%	87,42%
15	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	15.000.000	19.995.000	16.360.000	9.650.000	99,98%	81,80%	64,33%	82,04%
16	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	15.000.000	10.000.000	7.500.000	15.000.000	10.000.000	75,00%	100,00%	100,00%	91,67%

17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Lab	250.000.000	242.700.000	365.300.000	213.955.650	216.291.500	305.606.250	85,58%	89,12%	83,66%	86,12%
18	Pemeliharaan Website SKPD	2.500.000	-	20.000.000	2.500.000	-	18.360.000	100,00%	-	91,80%	63,93%
19	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor BLK	-	-	250.000.000	-	-	245.004.000	-	-	98,00%	32,67%
20	Penataan Lingkungan Dinas	-	195.000.000	330.000.000	-	181.025.000	300.938.340	-	92,83%	91,19%	61,34%
21	Pemeliharaan Rutin berkala Lingkungan / Halaman Gedung Kantor LIK	75.000.000	100.000.000	-	74.318.000	91.054.400	-	99,09%	91,05%	-	63,38%
22	Tambah Daya Gedung SKPD dan LIK - Laboratorium	55.000.000	-	-	25.631.000	-	-	46,60%	-	-	15,53%
23	Perluasan Penerapan Standar Uji Kompetensi Industri (LAB)	-	32.500.000	56.200.000	-	29.584.500	51.349.830	-	91,03%	91,37%	60,80%
24	Pengadaan Optional dan Sarana Peralatan Lab Uji Materi	85.000.000	100.000.000	73.500.000	83.561.000	92.957.000	65.624.250	98,31%	92,96%	89,28%	93,52%
25	Penataan Halaman Depan LIK	-	130.000.000	-	-	127.571.000	-	-	98,13%	-	32,71%
26	Pengadaan Tralis/Pengamanan Kantor LIK	-	15.000.000	-	-	14.942.800	-	-	99,62%	-	33,21%
27	Perawatan Gedung Kantor UPTD Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

28	Revitalisasi LIK (DAK)	-	-	5.713.410.000	-	-	4.428.091.645	-	-	77,50%	25,83%
29	Penyusunan DED Penunjang Revitalisasi LIK	-	-	75.000.000	-	-	74.018.000	-	-	98,69%	32,90%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	63.000.000	-	-	24.922.000	-	-	39,56%	13,19%
30	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-	-	25.000.000	-	-	6.294.000	-	-	25,18%	8,39%
31	Penyusunan Rencana Kerja Anggran (RKA)	-	-	15.000.000	-	-	7.946.000	-	-	52,97%	17,66%
32	Penyusunan Renstra SKPD	-	-	23.000.000	-	-	10.682.000	-	-	46,44%	15,48%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170.000.000	45.000.000	60.000.000	-	16.131.860	5.276.526	0,00%	35,85%	8,79%	14,88%
33	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000	35.000.000	30.000.000	-	10.609.860	2.166.526	0,00%	30,31%	7,22%	12,51%
34	Penilaian prestasi kerja	10.000.000	10.000.000	20.000.000	-	5.522.000		0,00%	55,22%	0,00%	18,41%
35	Maturitas SPIP			10.000.000	-	-	3.110.000	-	-	31,10%	10,37%
36	Pengajuan TUK Mandiri (Permanen) ke LSP	125.000.000	-	-	124.131.500	-	-	99,31%	-	-	33,10%
	Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	-	85.000.000	25.000.000	-	59.140.500	21.251.500	-	69,58%	85,01%	51,53%
37	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	-	30.000.000	25.000.000	-	12.788.000	21.251.500	-	42,63%	85,01%	42,54%

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.000.000	85.000.000	105.170.000	54.640.262	59.140.500	80.441.000	78,06%	69,58%	76,49%	74,71%
38	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	30.000.000	30.000.000	13.492.262	12.788.000	12.017.000	53,97%	42,63%	40,06%	45,55%
39	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan	45.000.000	45.000.000	50.170.000	41.148.000	40.648.000	49.875.000	91,44%	90,33%	99,41%	93,73%
40	Musrenbang OPD	-	10.000.000	25.000.000		5.704.500	18.549.000	-	57,05%	74,20%	43,75%
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	325.000.000	520.000.000	580.000.000	310.625.000	473.652.400	506.066.665	95,58%	91,09%	87,25%	91,31%
41	Penyusunan Database Perindustrian dan Perdagangan	-		30.000.000	-		28.546.100	-	-	95,15%	31,72%
42	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	100,00%	-	-	33,33%
43	Pengembangan Desain Kemasan & Fasilitasi Peralatan dan Kemasan Produk IKM	200.000.000	350.000.000	225.000.000	189.262.000	321.200.500	202.523.565	94,63%	91,77%	90,01%	92,14%
44	Pelatihan Desain Kemasan & Fasilitasi Peralatan dan Kemasan Produk IKM	75.000.000	-	-	71.363.000	-	-	95,15%	-	-	31,72%

45	Pelatihan peningkatan kualitas Produksi Bahan Bangunan Bagi IKM Kab.Tegal	-	40.000.000	50.000.000	-	36.849.000	43.089.850	-	92,12%	86,18%	59,43%
46	Pelatihan Teknologi Proses Finishing Industri Meubel bagi IKM Kab Tegal	-	40.000.000	50.000.000	-	37.759.900	41.434.850	-	94,40%	82,87%	59,09%
47	Pelatihan Ketrampilan Industri Anyaman Bambu	-	40.000.000	-	-	35.023.000	-	-	87,56%	-	29,19%
48	Pengembangan Kewirausahaan bagi IKM Minuman dan Makanan Kab.Tegal	-	-	50.000.000	-	-	30.564.850	-	-	61,13%	20,38%
49	Pelatihan pengembangan Usaha bagi IKM Kab.Tegal (AMT)	-	50.000.000	175.000.000	-	42.820.000	159.907.450	-	85,64%	91,38%	59,01%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10.000.000	20.000.000	20.000.000	9.218.182	15.696.600	18.513.640	92,18%	78,48%	92,57%	87,74%
50	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000.000	20.000.000	20.000.000	9.218.182	15.696.600	18.513.640	92,18%	78,48%	92,57%	87,74%
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	530.000.000	-	370.000.000	510.826.443	335.969.400	327.100.481	96,38%	-	88,41%	61,60%
51	Fasilitas Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil & Menengah dgn Swasta	-	-	100.000.000	-	-	87.015.335	-	-	87,02%	29,01%

52	Penyusunan Kebijakan Industri terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	200.000.000	-	-	193.795.737	-	-	96,90%	-	-	32,30%
53	Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat klaster Industri melalui Dekranasda	200.000.000	-	210.000.000	197.551.706	244.366.200	180.835.146	98,78%	-	86,11%	61,63%
54	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat (Musrenbangcam)	130.000.000	-	-	119.479.000	-	-	91,91%	-	-	30,64%
55	Pengolahan Limbah Industri	-	-	-	-	91.603.200	-	-	-	-	0,00%
56	Pengembangan Akses Pasar IKM	-	-	60.000.000	-	-	59.250.000	-	-	98,75%	32,92%
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	190.000.000	265.000.000	220.000.000	180.658.000	244.336.200	183.030.162	95,08%	92,20%	83,20%	90,16%
57	Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	125.000.000	100.000.000	150.000.000	120.068.000	91.603.200	116.492.462	96,05%	91,60%	77,66%	88,44%
58	Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur	35.000.000	25.000.000	-	31.710.000	18.050.000	-	90,60%	72,20%	-	54,27%
59	Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Inovasi Teknologi Masyarakat	30.000.000	-	-	28.880.000	-	-	96,27%	-	-	32,09%

60	Pembinaan Kemampuan Teknologi Batik	-	50.000.000	-	-	47.106.000	-	-	94,21%	-	31,40%
61	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu	-	90.000.000	70.000.000	-	87.577.000	66.537.700	-	97,31%	95,05%	64,12%
	Program Penataan Struktur Industri	145.000.000	100.000.000	295.000.000	141.368.000	98.048.000	235.194.962	97,50%	98,05%	79,73%	91,76%
62	Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri	75.000.000	50.000.000	100.000.000	72.005.000	49.103.000	81.292.850	96,01%	98,21%	81,29%	91,84%
63	Penerapan dan Pengembangan GKM (Gugus Kendali Mutu)	50.000.000	50.000.000	70.000.000	49.403.000	48.945.000	63.852.162	98,81%	97,89%	91,22%	95,97%
64	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (Musrenbangcam Margasari)	20.000.000	-	-	19.960.000	-	-	-	-	-	0,00%
65	Pembinaan dan Monitoring Industri Menengah dan Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
66	Pendataan Industri Hasil Tembakau dan Pengujian Kadar Tar & Nikotin	-	20.000.000	75.000.000	-	-	59.000.000	-	0,00%	78,67%	26,22%
67	Pelatihan Sistem Mutu Industri Kecil Minuman	-	-	50.000.000	-	-	31.049.950	-	-	62,10%	20,70%
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.180.000.000	2.071.160.000	2.620.000.000	1.102.879.800	1.885.697.550	2.444.180.850	93,46%	91,05%	93,29%	92,60%

68	Pelatihan Prakerin	35.000.000	-	-	27.190.000			77,69%	-	-	25,90%
69	Penyusunan BLUD BLK	25.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
70	Pengadaan Website BLK dan Pngelolaan Sistem Online BLK	15.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
71	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat	400.000.000	-	40.000.000	395.997.600	-	34.844.650	99,00%	-	87,11%	62,04%
72	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja (DBHCHT)	580.000.000	500.000.000		562.460.000	490.711.500	-	96,98%	98,14%	-	65,04%
73	Pemeliharaan Rutin atau berkala Peralatan Latihan BLK	-	25.000.000	25.000.000	-	20.780.000	24.085.000	-	83,12%	96,34%	59,82%
74	Pemeliharaan Rutin atau berkala Gedung Kantor BLK	-	69.800.000	55.000.000	-	69.434.000	54.600.000	-	99,48%	99,27%	66,25%
75	Rehab Instalasi Listrik Workshop atau Bengkel BLK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
76	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat Bidang Latpat	-	775.360.000	512.000.000	-	663.856.300	479.970.000	-	85,62%	93,74%	59,79%
77	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat Bidang Agro	-	159.000.000	432.000.000	-	157.624.900	399.023.300	-	99,14%	92,37%	63,83%

78	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat Bidang Logam	-	332.000.000	420.000.000	-	289.788.650	416.766.900	-	87,29%	99,23%	62,17%
79	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat UPTD BLK	-	210.000.000	936.000.000	-	193.502.200	854.885.000	-	92,14%	91,33%	61,16%
80	Pengadaan Perlengkapan Kantor BLK	50.000.000	-	200.000.000	44.089.900	-	180.006.000	88,18%	-	90,00%	59,39%
81	Pemeliharaan Gedung BLK	75.000.000	-		73.142.300	-	-	97,52%	-	-	32,51%
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	355.622.000	310.000.000	267.000.000	221.482.180	270.874.653	241.488.450	62,28%	87,38%	90,45%	80,03%
82	Penyusunan Informasi Bursa TK	120.622.000	125.000.000	125.000.000	112.292.000	120.715.000	121.662.000	93,09%	96,57%	97,33%	95,67%
83	Penyebarluasan Informasi Bursa TK	100.000.000	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%
84	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	50.000.000	60.000.000	45.000.000	48.845.000	54.299.000	40.640.000	97,69%	90,50%	90,31%	92,83%
85	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	35.000.000	25.000.000		30.750.180	17.915.353		87,86%	71,66%	-	53,17%
86	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	-	-	30.000.000	-		25.033.200	0,00%	-	83,44%	27,81%
87	Fasilitasi TKI Bermasalah	50.000.000	50.000.000	47.000.000	29.595.000	28.368.500	34.807.700	-	56,74%	74,06%	43,60%

88	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat	-	50.000.000	-	-	49.576.800	-	-	99,15%	-	33,05%
89	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	-	-	20.000.000	-	-	19.345.550	-	-	96,73%	32,24%
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	377.000.000	247.000.000	475.000.000	320.575.440	231.976.400	372.166.100	85,03%	93,92%	78,35%	85,77%
90	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50.000.000	50.000.000	90.000.000	39.406.500	45.154.000	68.022.100	78,81%	90,31%	75,58%	81,57%
91	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan	100.000.000	20.000.000	80.000.000	93.172.290	18.895.000	53.367.850	93,17%	94,48%	66,71%	84,79%
92	Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Perusahaan	52.000.000	52.000.000	85.000.000	33.649.000	50.650.000	50.638.200	64,71%	97,40%	59,57%	73,90%
93	Pembinaan dan Verifikasi SP/SB didalam dan Luar Perusahaan	75.000.000	75.000.000	120.000.000	58.056.800	69.495.000	109.286.950	77,41%	92,66%	91,07%	87,05%
94	Workshop & Pelatihan Sistem Pengupahan di Perusahaan	100.000.000	50.000.000	100.000.000	96.290.850	47.782.400	90.851.000	96,29%	95,56%	90,85%	94,24%
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	186.700.000	180.000.000	185.000.000	143.835.974	76.906.957	103.096.915	77,04%	42,73%	55,73%	58,50%

95	Pengembangan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	-	150.000.000	-	-	56.934.957	-	-	37,96%	-	12,65%
96	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	146.700.000	-	150.000.000	122.166.074	-	83.302.915	83,28%	-	55,54%	46,27%
97	Pelatihan Ketrampilan Calon Transmigran	40.000.000	30.000.000	35.000.000	21.669.900	19.972.000	19.794.000	54,17%	66,57%	56,55%	59,10%

c. Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Adapun realisasi program kegiatan urusan perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020

NO	URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN	TARGET RENSTRA 2020 (2019-2024)	TARGET 2020	REALISASI 2020	PERSENTASI CAPAIAN
Urusan Penunjang					
I. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian		5.410.000.000	2.621.980.000	2.302.048.683	87,80
1	Penyediaan Jasa Kantor	400.000.000	428.500.000	344.060.622	80,29
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	1.115.000.000	886.870.000	759.625.726	85,65
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.400.000.000	1.120.000.000	1.073.901.000	95,88
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65.000.000	12.210.000	2.300.000	18,84
4	Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	255.000.000	54.000.000	46.391.000	85,91
5	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	45.000.000	45.000.000	44.899.500	99,78
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	130.000.000	75.400.000	30.870.835	40,94

Urusan Pilihan					
<i>PERINDUSTRIAN</i>					
II. Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan		450.000.000	450.000.000	408.604.500	90,80
8	Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Agro	250.000.000	250.000.000	227.894.900	91,16
9	Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Kimia dan Kertas	100.000.000	100.000.000	93.839.800	93,84
10	Pembinaan Peningkatan Kualitas Produksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	100.000.000	100.000.000	86.869.800	86,87
III. Program Peningkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil, dan Aneka		5.570.671.000	2.742.784.000	2.512.275.150	91,60
11	Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Logam	100.000.000	100.000.000	84.779.800	84,78
12	Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Aneka	270.000.000	54.640.000	51.815.000	94,83
13	Peningkatan Kemampuan Teknik Produksi Industri Tekstil	150.000.000	143.000.000	142.943.900	99,96
14	Peningkatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Lembaga Penilaian Kesesuaian Produk Industri	500.000.000	500.000.000	449.572.800	89,91

15	Pengadaan Peralatan Pengujian Laboratorium	143.000.000	-	-	0,00
16	Peningkatan Fasilitas Operasional Penunjang LIK	200.000.000	23.940.000	21.240.000	88,72
17	Revitalisasi LIK	4.207.671.000	1.921.204.000	1.761.923.650	91,71
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
TENAGA KERJA					
IV. Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		1.580.000.000	1.147.584.000	812.739.300	70,82
18	Pendidikan dan Pelatihan Kepada Masyarakat	1.130.000.000	752.484.000	648.239.500	86,15
19	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	190.000.000	170.175.000	130.070.000	76,43
20	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	85.000.000	49.925.000	34.429.800	68,96
21	Pengembangan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	175.000.000	175.000.000	-	0,00
V. Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		420.000.000	223.033.000	159.565.200	71,54
22	Pelaporan dan Sinergitas Pendataan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	155.000.000	109.336.000	56.732.800	51,89

23	Pembinaan dan Verifikasi SP/SB di Dalam dan Luar Perusahaan	265.000.000	113.697.000	102.832.400	90,44
----	---	-------------	-------------	-------------	-------

Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 sebagaimana pada tabel 2.6 sedangkan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dalam Renstra 2019-2024 terdapat pada tabel 2.7 dibawah ini.

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	<i>Urusan Perindustrian</i>																		
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi																		
	Jumlah Pembinaan IKM	IKM	-	-	25	30	35	35	45	-	30		145	180	0	100	0	414,3	400
	Program Pengembangan IKM																		
	Jumlah Izin Usaha IKM Baru	IKM	-	-	15	20	25	25	35	-	0		94	63	0	0	0	376	180
	Jumlah Kerjasama IKM	IKM	-	-	8	10	12	9	16	-	11		9	16	0	110	90	100	100
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri																		
	Jumlah Produk SNI	Produk	-	-	3	5	7	9	12	-			3	2	0	0	0	33,33	16,67
	Program Penataan Struktur Industri																		
	Jumlah Klaster Industri Aktif	Industri	-	-	7	9	11	11	17	-	9		14	17	0	100	0	127,3	100
	<i>Urusan Tenaga Kerja</i>																		

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
	Penempatan AKAD	Orang	-	-	11.750	12.000	12.500	12.750	13.000	-	13.000	3.986	4.918	0	108,33	0	31,26	37,83	
	Penempatan AKAN	Orang	-	-	7.115	7.500	7.825	8.005	8.300	-	415	2.133	2.802	0	5,53	0	26,65	33,76	
	Penempatan AKL	Orang	-	-	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000	-	69	2.264	3.443	0	0,04	0	0,906	1,15	
	Jumlah Instruktur BLK	Orang	-	-	31	33	33	35	40	-	26	20	17	0	78,79	0	57,14	42,5	
	Jumlah Pelatihan Berbasis Masyarakat	Kegiatan	-	-	40	45	48	52	58	-	150	42	48	0	333,33	0	80,77	82,76	
	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kegiatan	-	-	45	49	55	63	65	-	20	50	40	0	40,82	0	79,37	61,54	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	-	-	4.26	4.16	4.06	3.96	3.86	-	9.8	7.70	8,45	0	105	0	120	100	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	-	71.06	74.30	79.60	82.56	88.02	-	62	69.3	65,26	0	90	0	90	95	

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Tingkat Kesempatan Kerja	%	-	-	93.11	93.95	94.15	95.70	96.15	-	57.9		92.31	91,55	0	60	0	90	97
	Jumlah LPKS	Lembaga	-	-	48	50	53	58	60	-	55		47	48	0	110	0	81,03	80
	Jumlah Bursa Kerja Khusus	Lembaga	-	-	45	48	50	42	52	-	32		40	34	0	66,67	0	95,24	65,38
	Jumlah PPTKIS	Lembaga	-	-	10	12	15	15	18	-	10		7	6	0	83,33	0		
	Jumlah Pelatihan Kerjasama LPKS	Kegiatan	-	-	30	40	50	60	65	-	150		50	48	0	375	0	83,33	73,85
	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	Kegiatan	-	-	2	4	6	8	10	-	3		6	6	0	75	0	75	60
	Program Perlindungan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																		
	Persentasi UMR : KHL	%	-	-	100	100	100	100	100	-	99.94		100	100	0	99,94	0	100	100
	Jumlah Sengketa Industrial	Kasus	-	-	14	14	12	10	8	-	17		14	14	0	141,67	0	140	175
	Jumlah Sengketa Industrial ditangani	Kasus	-	-	14	14	12	10	8	-	17		14	14	0	121,43	0	140	175

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi																		
	Jumlah Kerjasama Transmigrasi	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	0	100	0	100	100
	Jumlah Transmigran	Orang	-	-	47	52	57	62	67	-	22	-	13	78	0	42,31	0	20,97	116,42
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
	Program Perencanaan Tenaga Kerja																		
	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	NA	NA	NA
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	0,018	0,022	0	NA	NA	NA	NA

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
	Program Penempatan Tenaga Kerja																		
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	NA	6,07	28,33	53,88	26,65	0	NA	NA	NA	NA
	Program Hubungan Industrial																		
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	44,3	33,95	32,61	34,83	25,79	0	NA	NA	NA	NA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG																		

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	PERINDUSTRIAN																		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		-	-															
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP (Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota																		

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		-	-															
	Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SIINas)	Presentase	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		-	-															
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi																		

**Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal
Tahun 2015 - 2019**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase Transmigran yang ditempatkan	Presentase	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	Tujuan Renstra 2 : Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	-	-	7,45	7,2	7,05	6,85	6,6	9,82		131,8
	Sasaran Renstra 2.1. : Penempatan TenagaKerja (AKAN, AKAD, AKL)	Persen	-	-	660,246,140	672,261,159	684,276,178	696,291,197	708,306,216	193,1.020,1.493		32,414,1.066
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja											
	Penempatan AKAN, AKAD dan AKL	Jumlah	-	-	660,246,140	672,261,159	684,276,178	696,291,197	708,306,216	193,1.020,1.493		32,414,1.066
	Transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	0		0
	Sasaran Renstra 2.2. : Presentase penyelesaian hubungan industrial	Persen	-	-	50	55	65	70	70	50		100
	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial											
	Persentase penyelesaian hubungan industrial		-	-	50	55	65	70	70	50		100

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal pada tahun 2015 - 2019 tidak dapat dibandingkan pada hampir semua indikator, hal ini dikarenakan adanya perbedaan penetapan indikator antara Renstra yang lama dengan Perubahan Renstra yang baru. Ada pun indikator yang dapat dihitung pencapaiannya adalah :

- a. Jumlah Pembinaan IKM
- b. Jumlah Izin Usaha IKM Baru
- c. Jumlah Kerjasama IKM
- d. Jumlah Klaster Industri Aktif
- e. Jumlah Sengketa Industrial
- f. Jumlah Sengketa Industrial ditangani
- g. Jumlah Transmigran

Dari 24 (dua puluh empat) indikator Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Tegal pada periode 2014-2019, terdapat 7 (tujuh) indikator tersebut di atas memenuhi target, sedangkan 17 (tujuh belas) indikator lainnya tidak tercapai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum

dan pembinaan serta pengembangan dibidang perindustrian dan tenaga kerja di Kabupaten Tegal.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah:

A. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1) Urusan Perindustrian

- a) Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah.
- b) Rendahnya terapan sistem manajemen mutu.
- c) Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar.
- d) Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi.
- e) Rendahnya proses alih teknologi dalam rangka pengembangan mutu produk.
- f) Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif.

- g) Rendahnya kreatifitas masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat.

2) Bidang Tenaga Kerja

- a) Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak inovasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- b) Masih rendahnya kompetensi pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia;
- c) Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja;
- d) Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja;
- f) Masih adanya perusahaan yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- g) Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- h) Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang telah ditetapkan.
- i) Masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS;

B. Peluang

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sangat besar mengingat :

- a) Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian.
- b) Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten.
- c) Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan
- d) Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebarluasan informasi lapangan kerja.
- e) Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri.
- f) Mengikutsertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberi dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program dinas/instansi terkait serta *stakeholder* guna terwujudnya visi pembangunan daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan tahun 2019-2024 menuju Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah Kabupaten Tegal sangat potensial untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam sehingga diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal antara lain :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam upaya pengembangan pelayanan keperindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1. : Masalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Daya saing produk industri yang kurang	Pengembangan sektor industri yang belum optimal	Kompetensi SDM IKM yang masih perlu ditingkatkan
			Masih banyak IKM dan Produk IKM yang belum bersertifikasi
			Standardisasi Manajemen Usaha yang belum diterapkan sepenuhnya
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi pembangunan industri
		Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin	Kurangnya informasi terkait IUI oleh masyarakat
			Kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan IUI masih rendah
2	Masih banyaknya tenaga kerja yang belum terserap lapangan kerja	Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis	Tidak tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten Tegal
		Kompetensi tenaga kerja lokal yang kurang bersaing	Kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kerja yang belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kualitas lembaga pelatihan tenaga kerja yang kurang optimal
		Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal	Terbatasnya layanan informasi pasar kerja lokal
			Lemahnya koordinasi antar lembaga ketenagakerjaan
		Hubungan Industrial yang kurang harmonis	Fasilitas penyelesaian masalah hubungan industrial yang kurang optimal
			Monitoring dan evaluasi perusahaan yang belum optimal
3	Adanya transmigran yang kembali kedaerah dalam kurun waktu penempatan 1 (satu) tahun	Penyiapan Kapasitas calon transmigran yang belum optimal	Terbatasnya fasilitas pelatihan / pembekalan yang diberikan kepada calon transmigran
4	Belum optimalnya tata kelola perangkat daerah	Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan belum optimal	Keterbatasan jumlah pegawai dan kompetensi teknis SDM
		Kurangnya jumlah dan kompetensi teknis pegawai	
		Terbatasnya sarana dan prasarana	Keterbatasan alokasi anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk melihat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024.

Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL YANG SEJAHTERA MANDIRI, UNGGUL, BERBUDAYA, BERAHLAK MULIA”

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, berahlak mulia, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka akuntabel dan efektif melayani rakyat
- b. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan Infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi berwawasan lingkungan
- c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan .
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan soial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib aman tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Telaah terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam rangka mendukung misi (3) dan (4) yaitu **“Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju berkeadilan dan berkelanjutan “dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”**

Dalam upaya mewujudkan misi ke (3) dan (4) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Visi :</p> <p>Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia</p> <p>Misi 3 :</p> <p>Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.</p>	<p>Tugas Perangkat Daerah :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan pada urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. penetapan rencana kerja; b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perindustrian, tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sektor Industri yang belum maksimal - Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin - Masih rendahnya data industri yang terverifikasi - Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis 	<p>1) Urusan Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah. b) Rendahnya terapan sistem manajemen mutu. c) Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar. d) Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi. e) Rendahnya proses alih teknologi dalam rangka pengembangan mutu produk. f) Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif. g) Rendahnya kreatifitas 	<ul style="list-style-type: none"> a) Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. c) Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten. d) Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan e) Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebarluasan informasi lapangan kerja. f) Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Misi 4 :</p> <p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>dan transmigrasi;</p> <p>d. pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>e. pembinaan terhadap UPTD dan institusi bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>f. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;</p> <p>g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan belum optimal - Kurangnya jumlah dan kompetensi teknis pegawai - Terbatasnya sarana dan prasarana 	<p>masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat.</p> <p>2) Urusan Tenaga Kerja</p> <p>a) Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja;</p> <p>b) Masih rendahnya kualitas pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia;</p> <p>c) Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja;</p> <p>d) Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;</p> <p>e) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja;</p> <p>f) Masih banyaknya perusahaan</p>	<p>dan luar negeri.</p> <p>g) Mengikuti sertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.</p> <p>h) Kerjasama antar daerah dalam urusan transmigrasi yang terus ditingkatkan.</p>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			<p>yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;</p> <p>g) Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>h) Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang telah ditetapkan.</p> <p>i) Banyaknya perusahaan yang belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS;</p> <p>3) Urusan Transmigrasi</p> <p>a) Informasi pendaftaran peserta transmigran yang belum terpublikasi secara meluas</p> <p>b) Fasilitas pelatihan dan pembekalan kepada transmigran yang masih terbatas</p>	

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi

Pada bagian ini, analisis telaahan terhadap Renstra Kementerian Lembaga dan Dinas Propinsi terkait. Kementrian lembaga yang kita telaahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yaitu Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Dinas Provinsi terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Penekanan masing-masing renstra yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain :

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Tujuan :</p> <p>“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“</p> <p>Indikator Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%) - Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%) - Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang) - Nilai Ekspor 	<p>Tugas Perangkat Daerah :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan pada urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan rencana kerja; b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perindustrian, tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sektor Industri yang belum maksimal - Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin - Masih rendahnya data industri yang terverifikasi - Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis 	<p>1) Urusan Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah. b. Rendahnya terapan sistem manajemen mutu. c. Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar. d. Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi. e. Rendahnya proses alih teknologi dalam rangka pengembangan mutu produk. f. Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif. g. Rendahnya kreatifitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten. c. Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan d. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebarluasan informasi lapangan kerja. e. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri. f. Mengikuti sertakan serta staf

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)</p> <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas - Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 - Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri - Meningkatkan Penguasaan Pasar Industr - Penguatan Kewirausahaan dan 	<p>dan transmigrasi;</p> <p>d. pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>e. pembinaan terhadap UPTD dan institusi bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>f. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;</p> <p>g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan belum optimal - Kurangnya jumlah dan kompetensi teknis pegawai - Terbatasnya sarana dan prasarana 	<p>masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat.</p> <p>2. Urusan Tenaga Kerja</p> <p>a) Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja;</p> <p>b) Masih rendahnya kualitas pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia;</p> <p>c) Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja;</p> <p>d) Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;</p> <p>e) Terbatasnya sarana dan</p>	<p>yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.</p> <p>g. Kerjasama antar daerah dalam urusan transmigrasi yang terus ditingkatkan.</p>

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
Industri Kecil dan Menengah (IKM) - Meningkatnya Persebaran Industri			prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja; f) Masih banyaknya perusahaan yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama; g) Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3). h) Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang telah ditetapkan. i) Banyaknya perusahaan yang belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS; 2) Urusan Transmigrasi j) Informasi pendaftaran peserta transmigran yang belum terpublikasi secara meluas	

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			k) Fasilitas pelatihan dan pembekalan kepada transmigran yang masih terbatas	

Berdasarkan tabel telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2020-2024 diatas yang terkait dengan pembangunan perindustrian di Kabupaten Tegal yang harus diakomodir dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
- 2) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
- 3) Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
- 4) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi ;
- 5) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Sektor Industri;
- 6) Menguatnya struktur industri;
- 7) Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Tujuan :</p> <p>a. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar keaja yang fleksibel;</p> <p>b. mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;</p> <p>c. meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;</p> <p>d. meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dimasa datang;</p> <p>e. mewujudkan hubungan</p>	<p>Tugas Perangkat Daerah :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan pada urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. penetapan rencana kerja;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>d. pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>e. pembinaan terhadap UPTD dan institusi bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>f. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/keatausahaan Dinas;</p> <p>g. pengendalian, evaluasi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sektor Industri yang belum maksimal - Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin - Masih rendahnya data industri yang terverifikasi - Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis 	<p>1) Urusan Perindustrian</p> <p>a. Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah.</p> <p>b. Rendahnya terapan sistem manajemen mutu.</p> <p>c. Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar.</p> <p>d. Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi.</p> <p>e. Rendahnya proses alih teknologi dalam rangka pengembangan mutu produk.</p> <p>f. Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif.</p> <p>g. Rendahnya kreatifitas masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat.</p> <p>2. Urusan Tenaga Kerja</p> <p>a. Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan</p>	<p>a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian.</p> <p>b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten.</p> <p>c. Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan</p> <p>d. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebarluasan informasi lapangan kerja.</p> <p>e. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri.</p> <p>f. Mengikuti sertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.</p> <p>g. Kerjasama antar daerah dalam urusan transmigrasi yang terus ditingkatkan.</p>

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>industrial dan dialog social ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;</p> <p>f. mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;</p> <p>g. mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.</p> <p>Sasaran :</p> <p>- Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar</p>	<p>pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.</p>		<p>tenaga kerja;</p> <p>b. Masih rendahnya kualitas pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia;</p> <p>c. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja;</p> <p>d. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;</p> <p>e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja;</p> <p>f. Masih banyaknya perusahaan yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;</p> <p>g. Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>h. Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang</p>	

Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
kerja fleksibel. - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.			telah ditetapkan. i. Banyaknya perusahaan yang belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS; 3) Urusan Transmigrasi a. Informasi pendaftaran peserta transmigran yang belum terpublikasi secara meluas b. Fasilitas pelatihan dan pembekalan kepada transmigran yang masih terbatas	

Berdasarkan tabel telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 diatas yang terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal yang harus diakomodir dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
- 3) Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan;
- 4) Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
- 5) Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi;

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Laju Pertumbuhan sektor industri 	<p>Tugas Perangkat Daerah : Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan pada urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan rencana kerja; b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sektor Industri yang belum maksimal - Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin - Masih rendahnya data industri yang terverifikasi - Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis 	<p>1) Urusan Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah. b. Rendahnya terapan sistem manajemen mutu. c. Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar. d. Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi. e. Rendahnya proses alih teknologi dalam rangka 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten. c. Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan d. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	<p>d. pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>e. pembinaan terhadap UPTD dan institusi bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>f. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;</p> <p>g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan belum optimal - Kurangnya jumlah dan kompetensi teknis pegawai - Terbatasnya sarana dan prasarana 	<p>pengembangan mutu produk.</p> <p>f. Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif.</p> <p>g. Rendahnya kreatifitas masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat.</p> <p>2. Urusan Tenaga Kerja</p> <p>a. Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja;</p> <p>b. Masih rendahnya kualitas pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia;</p> <p>c. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja;</p>	<p>penyebarluasan informasi lapangan kerja.</p> <p>e. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri.</p> <p>f. Mengikuti sertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan.</p> <p>g. Kerjasama antar daerah dalam urusan transmigrasi yang terus ditingkatkan.</p>

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			<ul style="list-style-type: none"> d. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja; e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja; f. Masih banyaknya perusahaan yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama; g. Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3). h. Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang telah ditetapkan. i. Banyaknya perusahaan yang belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS; <p>3. Urusan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi pendaftaran peserta transmigran yang belum 	

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			<p>terpublikasi secara meluas</p> <p>b. Fasilitas pelatihan dan pembekalan kepada transmigran yang masih terbatas</p>	

Berdasarkan tabel telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diatas yang terkait dengan pembangunan perindustrian di Kabupaten Tegal yang harus diakomodir dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dalam Perekonomian Daerah;
- 2) Meningkatnya pertumbuhan industri.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi jumlah pengangguran <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja - Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja - Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dalam 	<p>Tugas Perangkat Daerah :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan pada urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana kerja; b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Sektor Industri yang belum maksimal - Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin - Masih rendahnya data industri yang terverifikasi - Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis 	<p>1) Urusan Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lemahnya daya saing industri karena kurang berkembangnya sistem inovasi daerah. b. Rendahnya terapan sistem manajemen mutu. c. Lambatnya manajemen informasi mengakibatkan response yang tidak tepat terhadap perubahan pasar. d. Kurangnya penghargaan terhadap karya intelektual/produk hasil invensi. e. Rendahnya proses alih teknologi dalam rangka pengembangan mutu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian. b. Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten. c. Tumbuh kembangnya industri kecil sebagai alternative lapangan pekerjaan d. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk media penyebarluasan informasi lapangan kerja.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
hubungan Industrial dan jaminan social - Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja - Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi	bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; d. pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; e. pembinaan terhadap UPTD dan institusi bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi; f. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas; g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas.	- Penanganan manajemen administrasi layanan umum, kepegawaian keuangan, dan perencanaan belum optimal - Kurangnya jumlah dan kompetensi teknis pegawai - Terbatasnya sarana dan prasarana	produk. f. Aksestabilitas masih rendah terhadap sumber-sumber pembiayaan alternatif. g. Rendahnya kreatifitas masyarakat menjadikan kurang berkembangnya sektor industri berbasis pengetahuan dan pelestarian budaya setempat. 2). Urusan Tenaga Kerja a. Jumlah pengangguran di Kabupaten Tegal masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja; b. Masih rendahnya kualitas pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan yang tersedia; c. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha	e. Terbukanya peluang kerja sama dalam penempatan tenaga kerja keluar daerah dan luar negeri. f. Mengikuti sertakan serta staf yang masih muda yang memiliki kompetensi dibidang pemanfaatan teknologi dan bidang teknis ketenagakerjaan. g. Kerjasama antar daerah dalam urusan transmigrasi yang terus ditingkatkan.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			<p>yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja;</p> <p>d. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;</p> <p>e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja;</p> <p>f. Masih banyaknya perusahaan yang belum membentuk Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama;</p> <p>g. Masih kurang adanya pemahaman terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>h. Masih adanya perusahaan yang membayar Upah Minimum dibawah UMK yang telah ditetapkan.</p> <p>i. Banyaknya perusahaan yang belum sepenuhnya mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS;</p>	

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
			3). Urusan Transmigrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi pendaftaran peserta transmigran yang belum terpublikasi secara meluas b. Fasilitas pelatihan dan pembekalan kepada transmigran yang masih terbatas 	

Berdasarkan tabel telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diatas yang terkait dengan pembangunan perindustrian di Kabupaten Tegal yang harus diakomodir dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
- 2) Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan Kerja;
- 3) Kualitas Penempatan Transmigrasi;
- 4) Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis;
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja;
- 6) Meningkatkan Perlindungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kabupaten Tegal secara khusus dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan ruang Kabupaten sebagai daerah industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal mencakup :

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Tegal, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal

Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focused Group Discussion (FGD)* ditetapkan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing IKM dan produk IKM.
2. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal.
3. Peningkatan kesejahteraan transmigran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tegal yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 maka ditetapkanlah rencana pembangunan jangka menengah atau jangka lima tahunan dan jangka pendek atau tahunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Industri
2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat Industri dengan Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah

Tujuan 2 Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan Sasaran yang akan dicapai :

- Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja
- Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja
- Meningkatnya Layanan Transmigrasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal beserta indicator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan Renstra 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri		Laju PDRB Sektor Industri	Persen	6,09	6,16	6,24	6,31	6,38
		Sasaran Renstra 1.1. Meningkatnya Mutu Produk IKM dan Perluasan Pasar dan Kepastian berusaha bagi IKM Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Industri Logam	Persen	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
		Sasaran Renstra 1.2. : Meningkatnya Mutu Produk IKM dan Perluasan Pasar dan Kepastian berusaha bagi IKM Agro, Kimia dan Hasil Hutan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Industri Logam	Persen	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
2	Tujuan Renstra 2. : Menurunnya Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,45	7,2	7,05	6,85	6,6
		Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Penempatan Tenaga Kerja (AKAN, AKAD, AKL)	Jumlah	660,246,140	1.320,492,280	1.980,738,420	2.640,1.228,560	3.300,1.720,700
		Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	Persen	50	55	65	70	70

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan Renstra 1 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat industri		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	Persen	-0,91	-0,91	2,25	4,56	5,40	6,56
	Sasaran Renstra 1.1. : Meningkatkan Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	Persen	60	60	60	70	80	100
Tujuan Renstra 2 : Menekan Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	9,82	10,42	10,21	9,54	8,45
	Sasaran Renstra 2.1. : Meningkatkan layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	Persen	-49,55	-49,55	5	10	15	20
	Sasaran Renstra 2.2. : Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	Persen	50	50	55	65	70	70
	Sasaran Renstra 2.3. : Meningkatkan Layanan Transmigrasi	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	Persen	0	0	100	100	100	100

CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGA

NO.	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB			INDIKATOR
MISI 3 : Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
1	Mewujudkan Perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi										
			Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri								
					Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri	Laju Pertumbuhan Lapangan usaha industri						
							Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing				

											PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP
											Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK
											Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah penguatan sentra unggulan Kab. Tegal

													Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan standarisasi
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pembangunan infrastruktur industri kecil menengah
													Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pengembangan wirausaha baru
													Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pembinaan sektor industri unggulan terhadap semua jumlah sektor industri unggulan

											PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
											Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis
											Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kab/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis
											Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI)	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan

												kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan	terhadap permohonan yang masuk SIINas
												Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	Persentase pengendalian industri terhadap jumlah rekomendasi teknis yang sudah dikeluarkan
												PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)
												Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi IKM
												Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan dan analisa data sistem informasi industri Nasional (SIINAS)	Persentase Jumlah IKM yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas terhadap IKM yang masuk di SIINas

													Desiminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kab/Kota	Tersusunnya data base IKM
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
1	Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Kedalaman Kemiskinan												
			Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka										
					Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka								
							Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja						
													PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
													Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Tersusunnya dokumen rencana Tenaga Kerja

											Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen rencana tenaga kerja makro
											PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
												Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi
											Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster
											Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Penganggur yang dilatih
											Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi
											Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi
												Persentase LPK yang memiliki perizinan

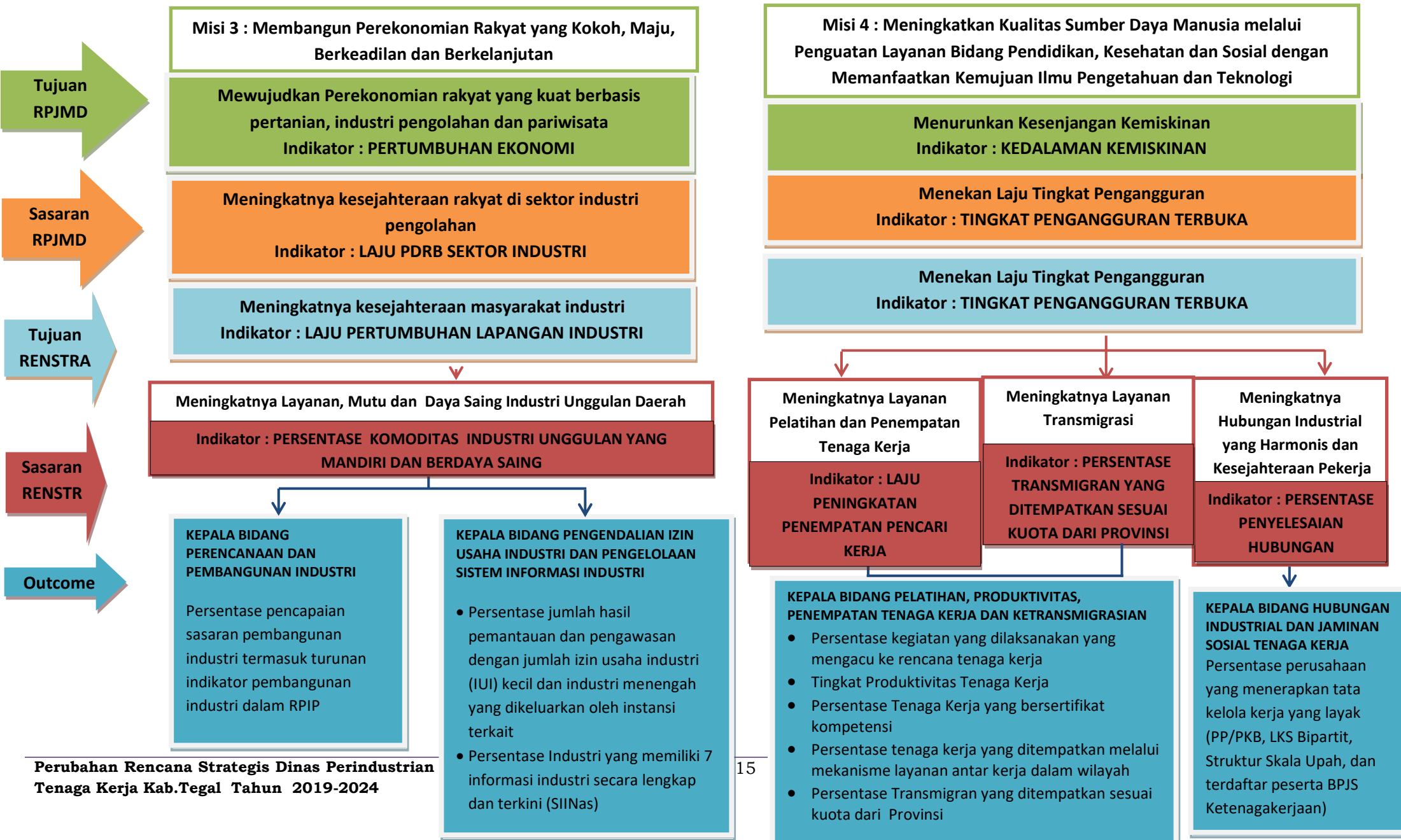
												Kegiatan Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja
												Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja
												PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah
												Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online (SISNAKER)
												Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pencarikerja yang terdaftar di Kabupaten • Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI/CTKI yang terdata

																		Lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten	
																		Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kabupaten/kota
																		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kabupaten/kota
																		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja
																		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya

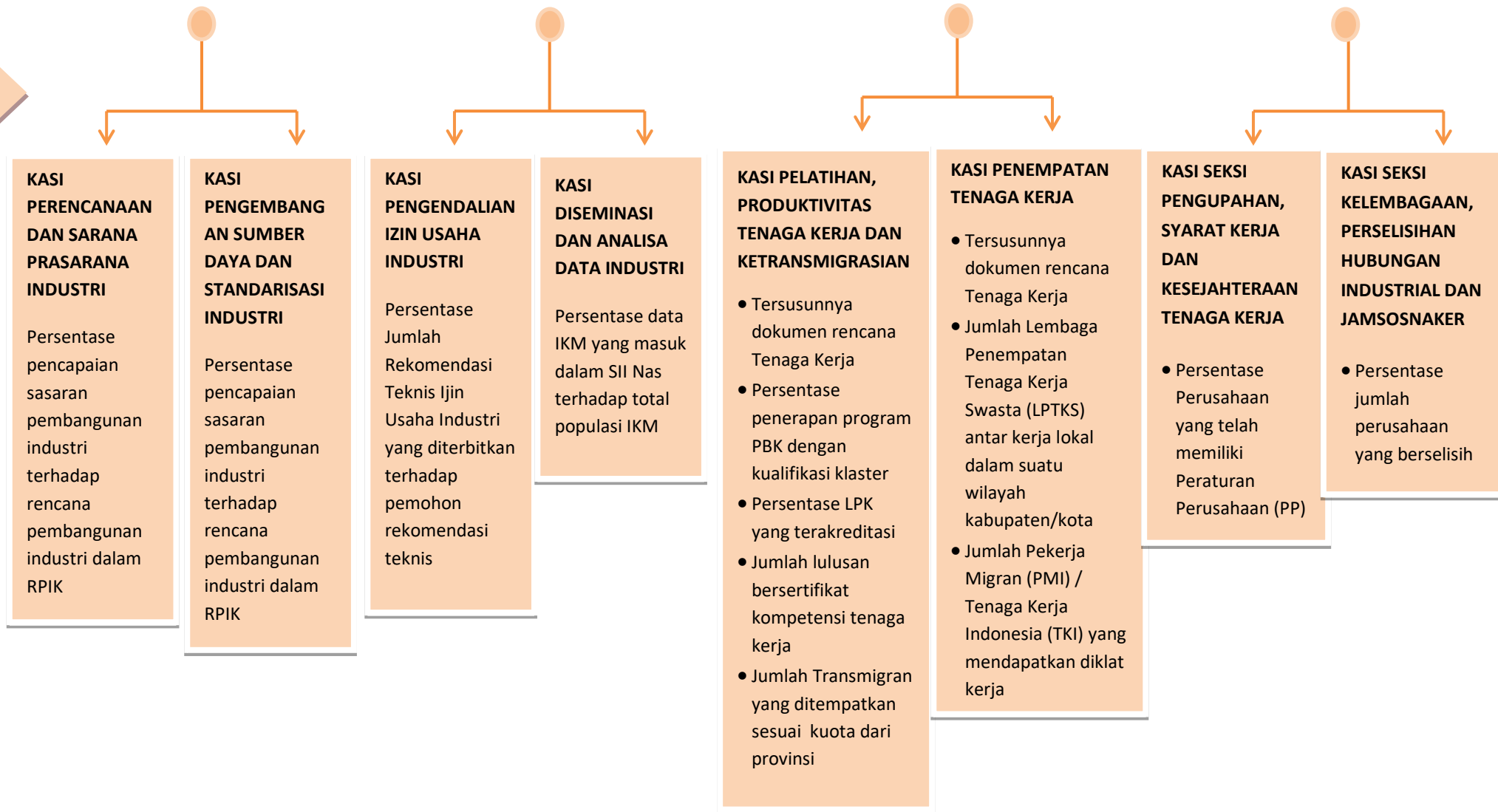
							Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial				
											PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
											Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
											Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah

												Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih
												Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh mediator Hubungan Industrial
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota Provinsi
												Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota Provinsi
												Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota Provinsi

CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL



Output



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan dimasa yang akan datang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional, hal ini menjadi landasan operasional dalam melakukan kegiatan dimasa mendatang.

Strategi disusun dengan mempertimbangkan setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai, untuk itu kebijakan dan program akan diklasifikasikan sesuai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi tercantum pada tabel 5.1.

5.2 Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu :

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
- b. melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
- c. pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah

- e. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.

5.3 Arah Kebijakan

Rangkaian Kebijakan merupakan penjelasan bagaimana sasaran akan dicapai melalui strategi yang telah disusun. Adapun Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2019-2024

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia							
Misi : 3. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan							
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri	Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah	Peningkatan Pendampingan & Pembinaan IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung penumbuhan wirausaha baru • Meningkatkan kapasitas SDM Industri melalui pelatihan & pendidikan teknis • Melakukan pembinaan tentang legalitas produk melalui sosialisasi dan pendampingan • Melakukan pendampingan teknologi tepat guna pasar digital • Persiapan akreditasi laboratorium dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggerakkan pengembangan SDM IKM Logam melalui pelatihan pengelasan (grade A) / permesinan pada welding centre baik Fero dan Non Fero • Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha melalui pendampingan sistem management mutu • Meningkatkan kualitas proses produksi melalui pendampingan 5R, GMP, CPPOB dll. • Meningkatkan daya saing / 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemudahan ketersediaan bahan baku logam dengan pengembangan jaringan material centre • Meningkatkan kapasitas SDM Industri melalui pelatihan produksi di bidang logam, tekstil dan makanan / minuman • Meningkatkan kualitas produk IKM melalui fasilitasi / sertifikasi produk (SNI, BKI, LMK, TKDN, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas & kapasitas SDM Industri dengan penyediaan Training Centre bagi IKM Logam • Meningkatkan Sarana & Prasarana Laboratorium Industri untuk penguatan skema akreditasi & TUK Mandiri • Pengembangan akses pasar bagi kemitraan usaha dengan perusahaan besar • Peningkatan sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama IKM Logam yang berstandarisasi dengan Tier 1 dan terciptanya Ekosistem Industri (adanya Laboratorium Industri, Training Center, Material Center, LPB, Tooling Center) • Meningkatkan kerjasama IKM dan pengembangan usaha pada IKM Tekstil, Aneka, Makanan dan Minuman.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEGAL

				<p>kualitas produk melalui fasilitasi merk, layanan klinik kemasan & HAKI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kemitraan usaha melalui Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) • Akreditasi Laboratorium Industri • Tempat Uji Kompetensi Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan akses pasar digital sebagai sarana marketing produk IKM • Pendampingan 5R, GMP, CPPOB dll. 	<p>prasarana Industri untuk mewujudkan ekosistem manufaktur pada IKM Logam dan Lingkungan Industri Kecil (LIK)</p>	
		<p>Peningkatan Kesadaran pelaku usaha tentang legalitas usaha / perijinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang perijinan industry (OSS & SIINas) • Meningkatkan layanan verifikasi SIINas • Evaluasi & monitoring perijinan industri bagi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang perijinan industry (OSS & SIINas) • Meningkatkan layanan verifikasi SIINas • Evaluasi & monitoring perijinan industri bagi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang perijinan industry (OSS & SIINas) • Meningkatkan layanan verifikasi SIINas • Evaluasi & monitoring perijinan industri bagi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang perijinan industry (OSS & SIINas) • Meningkatkan layanan verifikasi SIINas • Evaluasi & monitoring perijinan industri bagi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang perijinan industry (OSS & SIINas) • Meningkatkan layanan verifikasi SIINas • Evaluasi & monitoring perijinan industri bagi IKM

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEGAL

		Penguatan Data melalui verifikasi database IKM di Kabupaten Tegal.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi database IKM di wilayah Kecamatan Talang, Adiwerna, dan Dukuhturi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi database IKM di wilayah Kecamatan Pangkah, dan Kedungbanteng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi database IKM di wilayah Kecamatan Tarub, Kramat, Dukuhwaru, Pagerbarang, dan Jatinegara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi database IKM di wilayah Kecamatan Bojong, Bumijawa, Slawi dan Lebaksiu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi database IKM di wilayah Kecamatan Suradadi, Warureja, Margasari dan Balapulang.
Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, serta profesionalisme dan kepelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan penempatan • Memberikan fasilitasi pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan penempatan • Memberikan fasilitasi pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan penempatan • Memberikan fasilitasi pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan penempatan • Memberikan fasilitasi pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan perluasan kesempatan kerja, dan penempatan • Memberikan fasilitasi pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Peningkatan pembinaan, pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja • Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja • Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja • Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja • Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan layanan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja • Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEGAL

		perlindungan tenaga kerja					
	Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Peningkatan layanan dan kapasitas calon transmigran	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi • Meningkatkan kapasitas calon transmigran melalui sosialisasi dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi • Meningkatkan kapasitas calon transmigran melalui sosialisasi dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi • Meningkatkan kapasitas calon transmigran melalui sosialisasi dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi • Meningkatkan kapasitas calon transmigran melalui sosialisasi dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama antar daerah / penempatan transmigrasi • Meningkatkan kapasitas calon transmigran melalui sosialisasi dan pelatihan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Merujuk pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, telah dirumuskan 8 (delapan) Program Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sebagai jabaran operasional, sehingga dapat diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya yaitu :

6.1. Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 - 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Urusan Perindustrian

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

b. Urusan Tenaga Kerja

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

c. Urusan Transmigrasi

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6.1. Kegiatan

Rencana program dan kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Kegiatan Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

KERJA	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020-2024**

TUJUAN RENSTRA/SASARAN RENSTRA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	Kondisi Awal	2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra	
				2020	Kinerja	Pagu (000)	Kinerja	Pagu (000)	Kinerja	Pagu (000)	Kinerja	Pagu (000)	Kinerja	Pagu (000)
NON URUSAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.160	-	90.000	-	112.500	-	141.000	0	141.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	54.115	7 Dokumen	60.000	7 Dokumen	75.000	7 Dokumen	94.000	7 Dokumen	94.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	26.046	4 Dokumen	30.000	4 Dokumen	37.500	4 Dokumen	47.000	4 Dokumen	47.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				48.681		60.000		75.000		94.000		94.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tercukupinya Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	bulan	12	48.681	12	60.000	12	75.000	12	94.000	12	94.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-								

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat, Bimtek	Persen	-	-	1	65.000	1	80.000	1	100.000	1	100.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				279.893		350.000		429.000		527.625		527.625
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	21.517	1	26.000	1	32.500	1	40.625	1	40.625
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket	1	80.807	1	100.000	1	125.000	1	150.000	1	150.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	23.380	1	30.000	1	37.500	1	47.000	1	47.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum	bulan	12	36.880	12	46.000	12	57.500	12	72.000	12	72.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	34.609	12	44.000	12	54.000	12	64.000	12	64.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	10.870	12	14.000	12	17.500	12	22.000	12	22.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	71.830	12	90.000	12	105.000	12	132.000	12	132.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.492.190		3.602.797		3.740.297		3.912.797		3.912.797
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1	141.893	1	177.500	1	220.000	1	275.000	1	275.000

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	paket	1	300.000	1	375.000	1	470.000	1	587.500	1	587.500
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Perindustrian	paket	5	3.050.297	1	3.050.297	1	3.050.297	1	3.050.297	1	3.050.297
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				404.411		500.000		550.000		600.000		600.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, listrik	bulan	12	249.971	12	300.000	12	350.000	12	400.000	12	400.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	154.440	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				434.477								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional	bulan	12	260.000	12	325.000	12	400.000	12	425.000	12	425.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercukupinya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	100	72.960	100	100.000	100	150.000	100	200.000	100	200.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercukupinya Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	paket	1	101.517	1	150.000	1	200.000	1	250.000	1	250.000

			Pemeliharaan Rutin Berkala Laboratorium Uji dan Pemesinan (UPTD LAB.)	paket	1		1		1		1		1
URUSAN PERINDUSTRIAN													
Mewujudkan Perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata			Pertumbuhan Ekonomi										
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat industri			Laju Pertumbuhan Lapangan usaha industri (Target Baru)	-0,91	2,25		4,56		5,40		6,56		6,56
			Laju Pertumbuhan Lapangan usaha industri (Target Lama)	-1,4	6,16		6,24		6,31		6,38		6,38
Meningkatnya Layanan, Mutu dan Daya Saing Industri Unggulan Daerah			Persentase Komoditas Industri Unggulan yang mandiri dan berdaya saing	60	60		70		80		100		100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	60	60		70		80		100		100
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK	60	60		70		80		100		100

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam rangka mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah penguatan sentra unggulan Kab. Tegal	80 sentra	85 sentra	25.000	90 sentra	50.000	95 sentra	75.000	100 sentra	100.000	100 sentra	100.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan standarisasi	225 IKM	250 IKM	350.000	275 IKM	400.000	300 IKM	450.000	325 IKM	500.000.000	325 IKM	500.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pembangunan infrastruktur industri kecil menengah	5 IKM	10 IKM	750.000	15 IKM	1.500.000	20 IKM	2.000.000	25 IKM	2.500.000	25 IKM	2.500.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pengembangan wirausaha baru	5 kelompok WUB	10 kelompok WUB	250.000	15 kelompok WUB	375.000	20 kelompok WUB	500.000	25 kelompok WUB	625.000	25 kelompok WUB	625.000
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pembinaan sektor industri unggulan terhadap semua jumlah sektor industri unggulan	25 IKM	50 IKM	50.000	75 IKM	100.000	100 IKM	150 juta	125 IKM	200.000	125 IKM	200.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100		100		100		100		100	-

		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	100	100		100		100		100		-
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	100%	100%	100.000	100%	200 juta	100%	250.000	100%	300.000	1
		Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kab/Kota dalam memenuhi ketentuan perizinan	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan terhadap permohonan yang masuk SIINas	100%	100%	25.000	100%	50.000	100%	75.000	100%	100.000	1
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	20	40		60		80		100		100
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi IKM	10	20		30		40		50		50

		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Jumlah IKM yang melakukan pelaporan usaha melalui SIINas terhadap IKM yang masuk di SIINas	50%	60%	20.000	75%	25.000	80%	30.000	90%	35.000	0,9	35.000
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersusunnya data base IKM	2 Kecamatan	4 Kecamatan	150.000	6 Kecamatan	300.000	8 Kecamatan	450.000	10 Kecamatan	600.000	10 Kecamatan	600.000
URUSAN KETENAGAKERJAAN														
Menekan Laju Tingkat Pengangguran			Tingkat Pengangguran Terbuka (Target Lama)	9,82	7,20		7,05		6,85		6,60		6,6	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (Target Baru)	9,82	10,42		10,21		9,54		8,45		8,45	
Meningkatnya layanan pelatihan dan penempatan tenaga kerja			Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	-49,55	5		10		15		20		20	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	-	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		Tersusunnya dokumen rencana Tenaga Kerja	1	1		1		1		1		1	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Dokumen rencana tenaga kerja makro	1	1		1		1		1		1	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,008	0,009	416.000	0,009		0,009		0,009		0,009	

			Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	4,60		5,50		6,40		6,70		6,7	
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	44,44	22,22	286.000	46,24	400.000	82,3	700.000	100	900.000	100	900.000
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Penganggur yang dilatih	576	144		300		540		650		650	
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	4,76	9,52	104.000	14,29	432.000	16,67	548.000	23,81	764.000	23,80952 381	764.000
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	14	34		55		75		95		95	
			Persentase LPK yang memiliki perizinan	9,52	28		52		76		100		100	
		Kegiatan Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	0,00	0,00	-	300	250.000	540	500.000	650	1.000.000	650	1.000.000
		Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi tenaga kerja	0,00	0,00		300		540		650		650	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	17,82	25,00	110.000	30,00	200.000	35,00	220.000	40,00	240.000	40	240.000
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK) online (SISNAKER)	2.706	2.841	110.000	2.976	120.000	3.111	120.000	3.246	140.000	3246	140.000

		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencarikerja yang terdaftar di Kabupaten	15.189	15.889		16.589		17.289		17.989		17989	
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI/CTKI yang terdata	193	203		213		223		243		243	
			Lowongan kerja yang tersedia diwilayah kabupaten	2.713	2.845		2.965		3.050		3.175		3175	
		Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kabupaten/kota	6	6	-	6	-	6	100.000	6	150.000	6	150.000
		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kabupaten/kota	6	6	-	6	-	6	100.000	6	150.000	6	150.000
		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	167	200	-	250	80.000	300	100.000	350	100.000	350	100.000
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Data Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	0		40		80		100		100	
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan pekerja	Persentase penyelesaian hubungan industrial	50,00	55,00		65,00		70,00		70,00		70	

	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7,08	7,43	208.790	7,78	275.000	8,13	300.000	8,48	325.000	8,48	325.000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	38,18	40,08	41.597	41,98	98.000	43,88	110.000	45,78	120.000	45,78	120.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	15,59	20,43	41.597	24,19	98.000	29,03	110.000	33,87	120.000	33,87	120.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,05	1,05	167.193	1,05	177.000	1,05	190.000	1,05	205.000	1,05	205.000
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh mediator Hubungan Industrial	92,59	92,59	167.193	92,59	177.000	92,59	190.000	92,59	205.000	92,59	205.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	0	100		100		100		100		100	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	0	100		100		100		100		100	

		Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	0	3 KK	75.000	3 KK		3 KK		3 KK		3 KK	
--	--	---	--	---	------	--------	------	--	------	--	------	--	------	--

BAB VII

KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL

7.1 Indikator dan Target Kinerja Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan urusan Perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai.

Untuk mewujudkan pembangunan, dalam pelaksanaan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Penetapan indikator kinerja sasaran RPJMD 2019-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perindustrian, ketenagakerjaan dan transmigrasi adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Tujuan Renstra 1 : Laju PDRB Sektor Industri</i>	5,40	-1,46	6,16	6,24	6,31	6,38	6,38
	Sasaran Renstra 1.1. : Pertumbuhan sub sektor PDRB Industri Logam	7,00	-1,46	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
	Sasaran Renstra 1.2. : Pertumbuhan sub sektor Industri Agro	7,00	-1,46	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
	<i>Program Peningkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil, dan Aneka</i>							
	Jumlah IKM / Lembaga Usaha yang Terstandarisasi		45 IKM	30 IKM	35 IKM	40 IKM	45 IKM	45 IKM
	<i>Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan</i>							
	Jumlah IKM yang memperoleh Legalitas Usaha		280 IKM	220 IKM	240 IKM	260 IKM	280 IKM	280 IKM
	Tujuan Renstra 2 : Tingkat Pengangguran Terbuka	8,45	9,82	7,2	7,05	6,85	6,6	6,6
	Sasaran Renstra 2.1. : Penempatan TenagaKerja (AKAN, AKAD, AKL)	653,231,120	193,1,020,1.493	672, 261, 159	684, 276, 178	696, 291, 197	708, 306, 216	708, 306, 216
	<i>Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja</i>							
	Penempatan AKAN, AKAD dan AKL	653,231,120	193,1,020,1.493	672, 261,	684, 276,	696, 291,	708, 306,	708, 306, 216

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Murni)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				159	178	197	216	
	Transmigrasi yang dilaksanakan	100	0	100	100	100	100	100
	Sasaran Renstra 2.2. : Presentase penyelesaian hubungan industrial	40	50	55	65	70	70	70
	<i>Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial</i>							
	Persentase penyelesaian hubungan industrial	40	50	55	65	70	70	70

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra Perubahan)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	
	TUJUAN RENSTRA 1 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDUSTRI						
	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri	-0,91	2,25	4,56	5,4	6,56	6,56
	SASARAN RENSTRA 2.1. : MENINGKATNYA LAYANAN, MUTU DAN DAYA SAING INDUSTRI UNGGULAN DAERAH						
	Persentase Komoditas Industri Unggulan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing	60	60	70	80	100	100
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	60	60	70	80	100	100

	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						
	Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	100	100	100	100	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
	Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
	TUJUAN RENSTRA 2 : MENEKAN LAJU TINGKAT PENGANGGURAN						
	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82	10,42	10,21	9,54	8,45	8,45
	SASARAN RENSTRA 2.1. : MENINGKATNYA LAYANAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA						
	Laju Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	-49,55	5	10	15	20	20
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	4,60	5,50	6,40	6,70	6,70
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	17,82	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
SASARAN RENSTRA 2.2. : MENINGKATNYA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA						
Persentase penyelesaian hubungan industrial	50	55	65	70	70	70
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	7,08	7,43	7,78	8,13	8,48	8,48
SASARAN RENSTRA 2.3. : MENINGKATNYA LAYANAN TRANSMIGRASI						
Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota provinsi	0	0	100	100	100	100
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	0	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 merupakan acuan dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pembangunan. Renstra ini juga dapat digunakan Masyarakat dalam berpartisipasi dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal.

Selain sebagai acuan dalam Perencanaan, Perubahan Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah. Indikator Kinerja yang ditetapkan menjadi acuan bagi setiap atasan dalam menilai bawahan.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 semoga dengan adanya Perubahan Renstra ini diharapkan Pembangunan dibidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil-hasil pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyentuh kebutuhan masyarakat serta pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

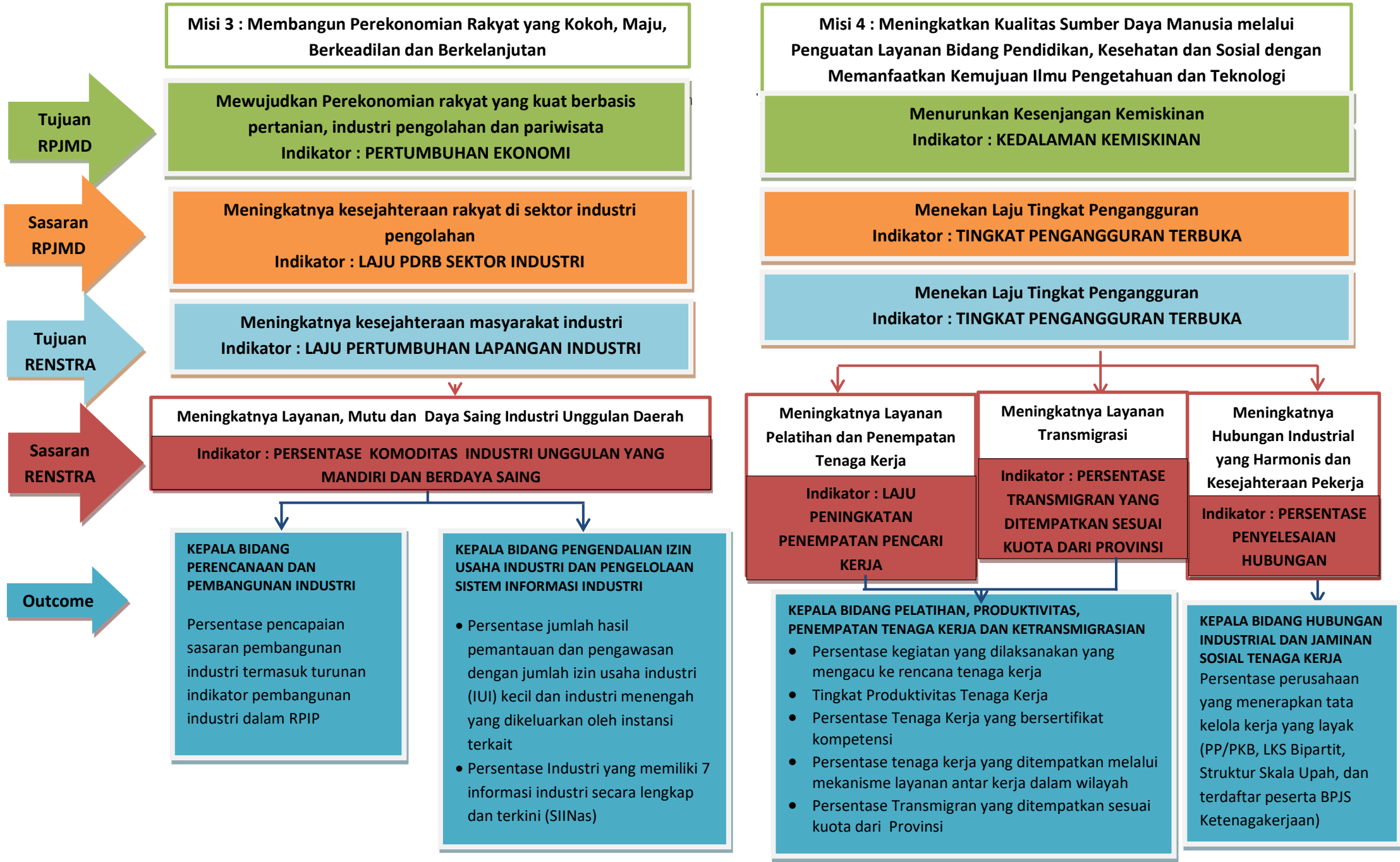
Slawi, 2021
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tegal

MOH. NUR MA'MUN, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19620816 198703 1 009

CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEGAL



Output

